

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN KAPUAS HULU

Irfan Sudarmaji. Sapto Kurniawan. Rofiq Nugroho. Steven Hoover S.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Putussibau

Abstract

Regional Fiscal Independence is one of the key factors that specifies whether local governments have been able to optimize local revenue from their regional local revenue (PAD) to finance their operational activities or are still dependent on funds transferred by the Central Government through Balance Funds (Dana Perimbangan). The purpose of this study is to determine the effect of Regional Local Revenue and Balance Funds on the fiscal independence index of Kapuas Hulu Regency. Data analysis, methods such as Multiple Linear Regression, F-test and T-test were used to find out the effect of two independent variables towards dependent variable using SPSS version 25. The study revealed that Regional Local Revenue had a positive effect on the Fiscal Independence Index while the Balance Fund influenced nonetheless negatively affected the Fiscal Independence Index of Kapuas Hulu Regency. This means that the higher the Balance Fund obtained, then the smaller the Fiscal Independence Index. This is what happened to the finances of Kapuas Hulu Regency. To handling this issue, Regional Government of Kapuas Hulu Regency must take steps to increase Regional Local Revenue.

Keywords: Balance Funds the Fiscal Independence Index, Regional Local Revenue

Abstrak

Kemandirian Fiskal Daerah menjadi salah satu faktor utama yang menentukan apakah pemerintah daerah telah mampu mengoptimalkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerahnya untuk membiayai kegiatan operasionalnya atau masih bergantung dari dana yang ditransfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Kapuas Hulu. Analisis data, metode seperti Regresi Linier Berganda, Uji-F dan Uji-T digunakan untuk mempelajari pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan bantuan SPSS v 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Kemandirian Fiskal sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh namun secara negatif terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Kapuas Hulu. Artinya bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan yang diperoleh maka semakin kecil Indeks Kemandirian Fiskalnya. Hal ini yang terjadi pada keuangan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu harus melakukan langkah-langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Dana Perimbangan, Indeks Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak sejarah baru dalam desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan diserahkannya sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Dalam perjalanannya, kedua undang-undang tersebut mengalami beberapa perubahan sebagai bentuk penyempurnaan peraturan diantaranya dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah lagi dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Esensi pelaksanaan otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah dianggap lebih paham akan urusan dan karakteristik daerahnya sendiri sehingga beberapa pelayanan umum diserahkan ke daerah. Implementasi otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat di daerah.

Dalam memberikan pelayanan umum di daerah, Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan dari segi fiskal. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah dengan adanya desentralisasi

fiskal. Dengan desentralisasi fiskal tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi alat bagi Pemerintah Daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sebagai amunisi dalam melakukan pembangunan di daerah. Saat ini undang-undang tersebut telah dicabut dengan disahkannya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain kemampuan keuangan yang didapat dari desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah membutuhkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan pembangunan di daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diberikan dalam bentuk transfer ke daerah. Transfer daerah disalurkan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID), serta Dana Desa.

Untuk mengukur kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunannya, terdapat indikator kemandirian fiskal. Indikator tersebut mengukur seberapa besar rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah tersebut. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri secara fiskal. Dan sebaliknya, semakin kecil rasio menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mandiri secara fiskal dan masih bergantung bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk transfer ke daerah dalam mendanai pembangunan di daerah tersebut.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk membangun daerahnya. Berdasarkan data realisasi APBD daerah tersebut kita dapat melihat bagaimana tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut.

sebagaimana berdasarkan klasifikasi Sampurna (2018).

Pemda Kapuas Hulu belum mampu menggali potensi-potensi lokal daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini tercermin dari realisasi PAD selama kurun waktu 2016-2020 yang cenderung stagnan.

Tabel 1.1.
Data Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 s.d. 2020 (Milyar Rupiah)

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN	1,695.81	1,609.87	1,623.07	1,785.71	1,598.07
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	64.80	86.02	76.00	79.87	78.39
3	Pendapatan Pajak Daerah	9.88	35.95	16.03	14.15	12.57
4	Pendapatan Retribusi Daerah	3.24	3.00	4.94	6.68	5.57
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.25	11.31	12.85	12.45	13.78
6	Lain-lain PAD Yang Sah	42.43	35.76	42.18	46.59	46.47
7	DANA PERIMBANGAN	1,345.35	1,271.03	1,268.62	1,390.11	1,179.17
8	Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	54.23	31.19	33.48	24.70	29.21
9	Dana Alokasi Umum	983.71	975.76	975.76	996.87	900.43
10	Dana Alokasi Khusus	307.41	264.09	259.39	368.54	249.53
11	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	285.66	252.82	278.44	315.72	340.50
12	Pendapatan Hibah	0.00	0.51	0.00	0.00	59.18
13	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	25.87	33.90	49.43	47.96	43.63
14	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	88.32	0.00	0.00	0.00	1.25
15	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	171.47	218.41	228.93	267.68	236.45
16	Dana Transfer Lainnya	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00

Sumber: www.sikd.djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 1.2.
Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 s.d. 2020

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)	0.038	0.053	0.047	0.045	0.049

Sumber: data diolah

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu dalam 5 tahun ke belakang (2016-2020), dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut belum mandiri secara fiskal. Hal ini ditunjukkan dengan kecilnya nilai IKF Kabupaten Kapuas Hulu yang masuk dalam rentang $0,00 \leq IKF \leq 0,25$ yang merupakan kategori belum mandiri

Kondisi ini menyebabkan indeks kemandirian fiskal Kapuas Hulu rendah (belum mandiri).

TINJAUAN LITERATUR

Dalam era otonomi daerah, urusan atau kewenangan daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengelola keuangannya. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditunjukkan oleh kemampuan keuangan daerahnya yang dilihat dari besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding dengan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Idealnya, seluruh kegiatan operasional daerah dapat dibiayai melalui pendapatan asli daerah tersebut. Semakin tinggi porsi PAD, maka semakin besar ruang fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga tingkat kemandirian daerah menjadi semakin tinggi dan tidak bergantung pada dana perimbangan melalui transfer ke daerah

Berdasarkan hasil penelitian Rahmat Saleh (2020), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2017. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2017. Dan Seluruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama dengan demikian artinya semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan sedikitnya Dana Perimbangan maka akan meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 2012-2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Anas (2018) yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di

Kabupaten Solok Selatan (Tahun 2005-2016), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Putri dan Sjadili (2013) menyimpulkan bahwa transfer dari pemerintah pusat, yaitu Dana Perimbangan, ditujukan untuk mendorong kegiatan perekonomian di daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang meningkat akan mendorong semakin tingginya tingkat kemandirian daerah.

Pengertian APBD

APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang memuat tentang rencana penerimaan, rencana pengeluaran serta rencana pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Menurut Saragih (2003:122), APBD adalah "Dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun".

Menurut Halim (2013: 20), definisi APBD adalah Suatu anggaran daerah, dimana memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, (2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang akan dilaksanakan, (3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. (4) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), APBD adalah "Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah). Hak tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Tujuan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, membangun keterbukaan informasi pengelolaan pajak daerah, meningkatkan kepatuan masyarakat dalam membayar pajak, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja penunjang pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim (2013). Sumber pendapatan daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Menurut Mardiasmo (2009:132), PAD adalah “Penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah”. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak. PAD terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Halim (2013), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, Dana Perimbangan adalah penerimaan daerah berupa sejumlah uang (kas) yang diperoleh suatu daerah dari pemerintah pusat melalui APBN untuk mendanai pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan Daerah tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan otonomi fiskal dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan

terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Halim (2014:131), DAU adalah Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum mempunyai bagian-bagian, yaitu:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Saragih (2003:104) "bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan". Selanjutnya menurut Saragih (2003:132), "tujuan DAU disamping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan atau equalization kemampuan keuangan pemerintah daerah".

DAU merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah-daerah yang kaya. Dengan kata lain, tujuan penting DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan

penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia" (Kuncoro, 2004:30). Menurut Mardiasmo (2007:157), tujuan DAU terutama adalah Untuk horizontal equity dan sufficiency. Tujuan horizontal equity merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (sufficiency), terutama adalah untuk menutup fiscal gap.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAK adalah: "Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional". DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan dana dalam APBN. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus atau komitmen atau prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:108), DBH adalah: "Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah.

DBH merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemda menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemda harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan DBH terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:23), yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Halim (2013:25), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari Keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Halim (2007:232) adalah "dengan rasio kemandirian (otonomi fiskal)". Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

"Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah" (Mahmudi, 2010: 128).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan

daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. "Semakin tinggi masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi" (Halim, 2007: 233).

Keterkaitan antar Variabel Penelitian

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat PDRB yang lebih baik. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD yang berkelanjutan tersebut akan menyebabkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah semakin berkurang. Daerah akan semakin leluasa dalam mengelola fiskal dan membiayai belanja daerahnya. Sebaliknya, apabila daerah memiliki PAD yang rendah,

maka pemenuhan untuk belanja daerah sangat tergantung pada dana transfer.

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis penelitian :

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap indeks kemandirian fiskal daerah.

b. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

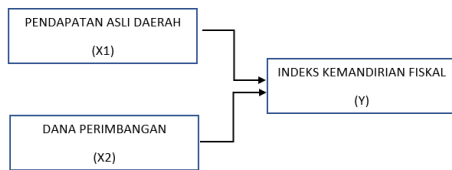
Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian :

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah

Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, digambarkan model penelitian yang digunakan :



Menurut Halim (2013), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; pendapatan transfer; dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah suatu Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan apabila pemerintah daerah berhasil meningkatkan penerimaan serta mengeksplor Pendapatan Asli Daerah secara optimal, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kemampuannya dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakatnya sendiri. Apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka akan diikuti oleh adanya peningkatan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2013), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah; pendapatan transfer; dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah suatu Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan apabila pemerintah daerah berhasil meningkatkan penerimaan serta mengeksplor Pendapatan Asli Daerah secara optimal, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kemampuannya dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakatnya sendiri. Apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka akan diikuti oleh adanya peningkatan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2013), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; pendapatan transfer; dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah suatu Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan apabila pemerintah daerah berhasil meningkatkan penerimaan serta mengeksplor Pendapatan Asli Daerah secara optimal, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kemampuannya dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakatnya sendiri. Apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah

mengalami peningkatan, maka akan diikuti oleh adanya peningkatan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2013), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; pendapatan transfer; dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah suatu Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan apabila pemerintah daerah berhasil meningkatkan penerimaan serta mengeksplor Pendapatan Asli Daerah secara optimal, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kemampuannya dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakatnya sendiri. Apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka akan diikuti oleh adanya peningkatan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2013), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; pendapatan transfer; dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah suatu Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan apabila pemerintah daerah berhasil meningkatkan penerimaan serta mengeksplor Pendapatan Asli Daerah secara optimal, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kemampuannya dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakatnya sendiri. Apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka akan diikuti oleh adanya peningkatan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2013), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; pendapatan transfer; dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah suatu Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan apabila pemerintah daerah berhasil meningkatkan penerimaan serta mengeksplor Pendapatan Asli Daerah secara optimal, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kemampuannya dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakatnya sendiri. Apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka akan diikuti oleh adanya peningkatan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian explanatory survey adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif.

Populasi dan Sampel Penelitian

Sehubungan dengan unit analisis penelitian pada Pemerintah Daerah Kapuas Hulu secara keseluruhan maka teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan sampel data sekunder Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dilansir dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (skid.djpk.kemenkeu.go.id) kurun waktu Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020.

Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah pengolahan data, penulis menggunakan software Microsoft Office Excel 2019 dan SPSS versi 25. Pengolahan dan analisis data setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, baik variabel-variabel independen maupun variabel dependen, akan menggunakan Microsoft Office Excel 2019 untuk mengetahui perkembangan data kuantitatif setiap variabel dari tahun ke tahun.

Analisis Variabel Penelitian

Untuk menganalisis variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel independen dan indeks kemandirian fiskal sebagai variabel dependen, digunakan software Microsoft Office Excel 2019 dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan perolehan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 serta mengetahui pengaruhnya terhadap indeks kemandirian fiskal Kabupaten Kapuas Hulu.

Persamaan Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hipotesis sebagaimana pada bagian terdahulu, maka rumus persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y = Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)

α = konstanta

β = koefisien regresi

X1= Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2= Dana Perimbangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi diatas harus bersifat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*, artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji T tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar. Tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linear berganda

yaitu: 1. Tidak boleh ada autokorelasi, 2. Tidak boleh ada multikolinieritas 3. Tidak boleh ada heteroskedastitas. Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji T menjadi bias.

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00077147
Most Extreme Differences	Absolute	.242
	Positive	.242
	Negative	-.213
Test Statistic		.242
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

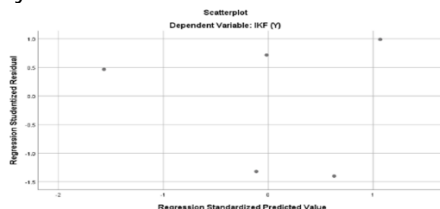
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.sig sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05. maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-smirnov dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Dengan demikian, persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

2. Uji Heteroskedastisitas



Dari output scatterplots SPSS di atas dapat diketahui bahwa titik-titik yang terjadi tidak mengumpul disatu titik serta penyebarannya tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastistas sehingga model

regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

3. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.031	.012			2.570	.024		
PAD (X1)	.001	.000	.899		8.268	.015	.924	1.082
DANA PERIMBANGAN (X2)	-2.355E-5	.000	-.343		-3.357	.078	.924	1.082

a. Dependent Variable: IKF (Y)

Berdasarkan output diatas, berdasarkan nilai tolerance didapatkan angka 0.924 lebih besar dari 0.10. Sedangkan dari nilai VIF didapatkan nilai sebesar 1.082 lebih kecil dari 10.

Kedua hal tersebut artinya bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 ^a	.981	.961	.001091	1.015

a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN (X2), PAD (X1)

b. Dependent Variable: IKF (Y)

Berdasarkan nilai diatas dan dibandingkan dengan nilai tabel pada Tabel Durbin Watson didapatkan hasil 1.015 lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian maka analisis regresi berganda untuk uji hipotesis di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan.

Uji Koefisien dan Regresi

Uji koefisien dan regresi dilakukan menggunakan program SPSS yang meliputi: Uji T, Uji F, dan Uji Determinasi.

1. Uji T

Uji T dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen (independent variable) secara parsial terhadap variabel dependen (dependent variable). Berikut ini adalah hasil output SPSS untuk Uji T:

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standard Error	Beta		
1 (Constant)	.031	.012		2.570	.024
PAD (X1)	.001	.000	.839	8.208	.015
DANA PERIMBANGAN (X2)	-2.355E-5	.000	-.343	-3.357	.038

a. Dependent Variable: IKF (Y)

Berdasarkan data di atas, hasil uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik T), yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kemandirian Fiskal. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak. Dilihat dari hasil pada output di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai Sig. 0.015 dan thitung sebesar 8.208. Karena signifikansi pada uji T lebih kecil dari 0,05 ($0.015 < 0,05$) dan nilai thitung $> t_{tabel}$ ($8.208 > 4.303$) maka H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Indeks Kemandirian Fiskal.
- b. Dana Perimbangan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_2 diterima. Dilihat dari hasil diatas, terlihat bahwa Dana Perimbangan memiliki nilai Sig. 0,038 dan thitung sebesar -3,357. Karena signifikansi pada uji T lebih kecil dari 0,05 ($0,038 < 0,05$) dan nilai thitung $< t_{tabel}$ (-

$3,357 < 4.303$) maka H_0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Indeks Kemandirian Fiskal.

2. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Indeks Kemandirian Fiskal. Berikut ini adalah hasil output SPSS untuk Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	2	.000	50.750	.019 ^b
	Residual	.000	2	.000		
	Total	.000	4			

a. Dependent Variable: IKF (Y)

b. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN (X2), PAD (X1)

Dari data tersebut menunjukkan hasil perhitungan regresi dengan nilai F- hitung sebesar 50.750 dengan taraf signifikan sebesar 0,019, sedangkan nilai F-tabel adalah sebesar 9,55. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F- hitung $> F$ - tabel ($50.750 > 9,55$) artinya secara keseluruhan yakni Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Uji Determinasi

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen (independent variables) yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (bersama-sama) dalam menjelaskan

variabel dependen (dependent variable), yaitu Indeks Kemandirian Fiskal. Berikut ini adalah hasil output SPSS untuk uji determinasi:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	.981	.961	.001091

a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN (X2), PAD (X1)

Berdasarkan hasil uji determinan, model regresi dalam penelitian ini memiliki nilai R sebesar 0.990; R^2 sebesar 0.981; dan adjusted R^2 sebesar 0.961. Nilai R sebesar 0.990 menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara variabel independen dengan variabel dependennya. Adjusted R^2 sebesar 0.961 atau 96.1% menunjukan bahwa variasi dari Indeks Kemandirian Fiskal dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Sedangkan sisanya yakni sebesar 3.9% (100%-96.1%) dipengaruhi variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penulis mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Kemandirian Fiskal

Berdasarkan Uji Signifikan Individual (uji T) yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara

parsial antara variabel independen dengan dependen menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dengan memiliki t-hitung sebesar 8.208 dan taraf signifikan 0,015 yang lebih kecil dari 0,05, sedangkan t-tabel memiliki nilai sebesar 4.303. Dalam penelitian tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, karena nantinya Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan daerah sehingga terciptanya daerah yang memiliki kemandirian dan dapat terciptanya otonomi daerah. Jika melihat data realisasi PAD pada Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016 s.d. 2020 bergerak fluktuatif naik dan turun. Hal ini tentu akan mempengaruhi juga tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal

Berdasarkan Uji Signifikan Individual (uji T) yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan dependen menyatakan bahwa, Dana Perimbangan tidak berpengaruh dengan memiliki t-hitung sebesar -3.357 dengan taraf signifikan 0,038 yang lebih kecil dari 0,05, sedangkan t-tabel memiliki nilai sebesar 4.303. Dalam penelitian tersebut dapat dilihat bahwa

Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Kapuas Hulu namun bernilai negatif. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa apabila dana perimbangan mengalami peningkatan, maka kemandirian fiskal daerah Kapuas Hulu akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Apabila perolehan Dana Perimbangan mengalami penurunan, maka tingkat Kemandirian Fiskal Daerah akan mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil pengolahan data mengenai analisis terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang fluktuatif namun cenderung menurun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan nilai Indeks Kemandirian Fiskal Kapuas Hulu yang fluktuatif naik turun namun mengarah pada kenaikan indeks.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap indeks kemandirian fiskal Kapuas Hulu. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap indeks kemandirian fiskal. Artinya semakin tinggi dana perimbangan yang diperoleh maka semakin kecil indeks kemandirian fiskal suatu daerah. Hal ini yang terjadi pada keuangan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu harus melakukan langkah-langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya.

Saran yang dapat kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui:

Pertama, Penguatan regulasi dan administrasi pendapatan daerah termasuk penyusunan peraturan pengelolaan PAD seperti regulasi terkait dengan perdagangan burung walet dan ikan arwana

Kedua, Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan seperti retribusi pariwisata, jasa reklame dan jasa parkir

Ketiga, Modernisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM daerah, termasuk modernisasi proses pemungutan pajak (seperti penggunaan sistem teknologi informasi dan pembaruan data wajib pajak secara elektronik) seperti pembayaran pajak daerah secara *online* melalui *marketplace*

Keempat, Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah.

Kelima, Sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, kepolisian, dan perbankan.

Selanjutnya kedepan fungsi Dana Perimbangan agar difokuskan dalam mendukung atau menunjang pengembangan kegiatan prioritas terutama untuk komoditas potensi lokal Kabupaten Kapuas Hulu yang efeknya akan meningkatkan PAD seperti

Sektor Perikanan: Berada di aliran Sungai Kapuas dan Danau Sentarum, menjadikan sektor perikanan air tawar menjadi potensial. Kapuas Hulu memiliki beragam spesies ikan air tawar yang khas. Ikan konsumsi dari Kapuas Hulu banyak diminati daerah lain, bahkan negeri jiran. Belum lagi potensi ikan arwana super red yang merupakan hewan endemik Kapuas Hulu dan sudah

dikenal keindahannya di seluruh dunia. Belum lagi potensi budidaya sarang burung walet yang dapat memberikan tambahan pendapatan yang besar bagi daerah.

Sektor Pariwisata:Kapuas Hulu memiliki pesona alam yang indah seperti Danau Sentarum, dan beberapa wisata alam lain seperti hutan lindung, sungai, danau, dan air terjun yang masih terjaga keasliannya. Pos Lintas Batas Negara Badau juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Sektor Pertanian dan Perkebunan: Kondisi geografis Kapuas Hulu yang sangat luas dapat dikembangkan untuk berbagai budidaya tanaman. Kratom atau purik Kapuas Hulu memiliki kualitas tinggi yang sangat terkenal di luar negeri. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan karet, kelapa sawit, serta buah-buahan lokal sangatlah besar. Durian Kapuas Hulu terkenal memiliki kualitas premium.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dalam bidang praktis yaitu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Kemandirian Fiskal suatu kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat mempengaruhi Kemandirian Fiskal. Dimana tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Kapuas Hulu dalam rentang waktu 2016 s.d. 2020 mengalami peningkatan sebesar 28%. Sedangkan implikasi di bidang keilmuan, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi materi

yang berhubungan dengan sektor publik atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan topik penerimaan/pendapatan daerah dan tingkat kemandirian fiskal daerah Terlebih bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama.

Keterbatasan peneliti antara lain belum dapat data yang update untuk tahun 2021 sehingga data yang dipakai masih sampai dengan tahun anggaran 2020 serta pemilihan variabel bebas pada penelitian ini hanya sebatas variabel Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan untuk menjelaskan variabel indeks kemandirian fiskal, sedangkan sebenarnya terdapat variabel lain yang dapat mengukur kemandirian fiskal suatu daerah yang tidak termasuk pada penelitian ini. Keterbatasan yang lain adalah rentang waktu penyelesaian penelitian yang dirasa cukup pendek karena adanya kesibukan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Hal ini juga berimbas penulis tidak mendapatkan informasi primer langsung dari Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kapuas Hulu.

REFERENSI

- Anas, M. I. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Solok Selatan (Tahun 2005 Sampai 2018). Skripsi. Universitas Andalas.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. 2007. Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul dan Nasir, Jamal Abdul. 2006. Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. Jurnal Manajemen Usahawan. Nomor 06 Th XXXV Juni 2006. Jakarta: Lembaga Management FE-UI.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putri, F. G. M. 2013. Pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap tingkat kemandirian daerah: studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2006-2010= The effect of intergovernmental transfer, capital expenditure, and regional loan to level of local independence: empirical studies on Local Government in Indonesia period 2006-2010.
- Sampurna, A. F. 2018. Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal. Makalah Disajikan dalam Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi Tanggal 18 September 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Rahmat. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 15 No.2 Juli 2020: 111 – 134

Syarifin dan Jubaedah. 2005.
Hukum Pemerintahan Daerah.
Pustaka Bani Quraisy.